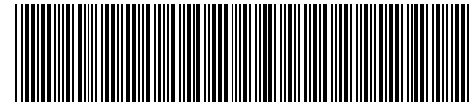




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.667791/2024**



DS:3570-9223-1142-1418

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
4. Kode>Nama Satker : (667791) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
- Sebesar : Rp. 280.971.000 (DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 280.971.000
013.11.WA.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 280.971.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 280.971.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 280.971.000

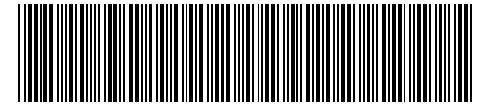
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3570-9223-1142-1418

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667791) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			280.971.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			280.971.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	280.971.000
Rincian Output	:	01	ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	4,00	Rekomendasi Kebijakan	274.322.000
		02	ABD.002 Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	6.649.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

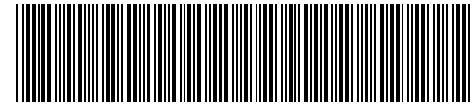
ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2024

I B. SUMBER DANA



DS:3570-9223-1142-1418

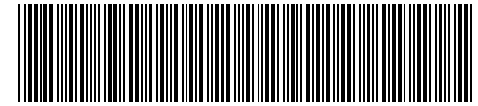
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
 Kode>Nama Satker : (667791) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	280.971.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	280.971.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3570-9223-1142-1418

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667791) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
Kewenangan : (KD)

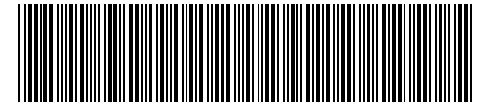
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
667791	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	-	280.971	-	-	-	280.971	32 . 52	
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	280.971	-	-	-	280.971		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	280.971	-	-	-	280.971		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	280.971	-	-	-	280.971		
01	RM	-	280.971	-	-	-	280.971		
JUMLAH		-	280.971	-	-	-	280.971		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3570-9223-1142-1418

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667791) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

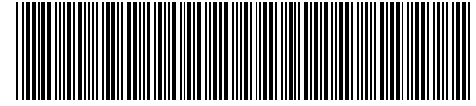
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667791	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	8.109	28.972	14.980	40.230	23.220	27.580	28.990	36.060	33.220	25.440	5.560	8.610	280.971
		BELANJA BARANG	8.109	28.972	14.980	40.230	23.220	27.580	28.990	36.060	33.220	25.440	5.560	8.610	280.971
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	8.109	28.972	14.980	40.230	23.220	27.580	28.990	36.060	33.220	25.440	5.560	8.610	280.971
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	8.109	28.972	14.980	40.230	23.220	27.580	28.990	36.060	33.220	25.440	5.560	8.610	280.971

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3570-9223-1142-1418

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [667791] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

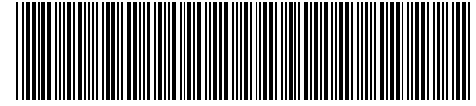
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttt.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:3570-9223-1142-1418

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [667791] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttt.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002